



Pemkot Usut Kasus Pungli

Disdik Diminta Cari Data Konkret

YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta bereaksi cepat menanggapi informasi adanya pungutan liar (pungli) sekolah negeri di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Wali Kota Herry Zudianto memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mencari bukti konkret pungli tersebut.

Wali Kota tidak akan menoleransi sekolah negeri di wilayahnya yang melakukan praktik pungli. Sebab, sekolah tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah dan Peraturan Wali Kota. "Saya minta mulai hari ini Disdik mengumpulkan data konkret," tandasnya kemarin.

Sekolah negeri yang terbukti melakukan praktik pungli akan diberikan sanksi administrasi. Bentuk sanksinya disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dapat dilihat dari proses penentuan pungutan tersebut.

Sebelumnya, Kementerian

Pendidikan Nasional mengumumkan adanya pungli bagi siswa baru di 1.200 sekolah secara nasional. DIY menjadi salah satu daerah dengan kasus pungli cukup tinggi. Informasi tersebut dibenarkan oleh Disdikpora DIY yang telah melakukan survei ke sejumlah sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan kabupaten dan kota. Dari penelusuran yang dilakukan, pungutan yang dikeluhkan adalah jenis Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) untuk SD dan SMP. Namun untuk Yogyakarta, kasus paling banyak terjadi pada jenjang SMP.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori menyebutkan, pungli di sekolah melanggar PP 47

dan 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Wajib Belajar. Aturan tersebut telah ditindaklanjuti oleh instansinya dengan keluarnya Surat Edaran (SE) No 900/um/2198 tertanggal 10 Juni 2011 tentang Pendanaan Awal Tahun Ajaran.

Ditegaskan, dalam edaran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tersebut, sekolah negeri non-RSBI tidak diperbolehkan melakukan pungutan. "Secara prinsip, asalkan sekolah tersebut negeri non-RSBI, tidak boleh memungut seperti sumbangan gedung, pengadaan buku, dan sebagainya," tandasnya.

Terkait dengan biaya operasional sekolah, pemerintah telah memberikan bantuan yang jumlahnya cukup banyak. Kota Yogyakarta mendapatkan BOS Pusat dengan total nilai Rp31,137 miliar dan BOSDA Rp10,5 miliar, yang terdiri atas Rp8,5 miliar untuk sekolah negeri dan Rp2 miliar untuk sekolah swasta.

● maha deva

gVandia

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005